

Pengaruh Politik Isolasi (*Sakoku*) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II

Yusy Widarahesty^{1*}, Rindu Ayu²

Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110
No.Telp : 021.-7244456, Fax : 021-72792753, * email : ydunk_de@yahoo.com

Abstract - Japan's politics have experienced of many growth and change at any given time in the past. And one of the salient themes which has emerged in the Japanese society in the modern era is an emphasis on traditional values; values such as perseverance, frugality, diligence, effort, family, sacrifice, the spirit of harmony, and deference for the elderly. The problem is that these traditional values be the important basis for Japanese principles in guiding Japanese policy in World war era. The targets of this research itself are to show the influence of Japan's political insulation in the feudal era (*Edo*) to Japan nation nationalism in World War I and II. This research includes qualitative research with descriptive analysis. It also used political Theory abroad and nationalism. The result from this analysis can be concluded that the insulation politics during 250 year at period of Tokugawa (feodal) have given many influence to forming of Japan society characters until modern era specially characters which forming Japan nation nationalism in a period of World War I and II. This matter can be seen through various statement and also the reasons from all of military elite, soldier until its society which carrying many traditional reasons in the War time.

Keyword - *Insulation Politics, Feudalism, Nationalism, World War I and II, Japan*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bangsa yang pernah memiliki sejarah sebagai suku bangsa yang terisolasi, kemudian berubah menjadi masyarakat industri terkemuka yang paling berpengaruh, tentunya menjadi sangat

menarik mempelajari latar belakang budaya dan pola politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsanya yang pernah mengalami masa politik isolasi yaitu sejak 1638 sampai 1863, yang juga disebut dengan periode Tokugawa.

Selama lebih dari dua ratus tahun pada masa Edo, Jepang secara berturut-turut berada di bawah kepemimpinan keluarga Tokugawa. Pada periode ini juga Jepang menjalankan Politik *sakoku* atau isolasi. Politik *sakoku* adalah suatu kebijakan politik yang menutup diri dari intervensi asing dalam segala bidang.

Zaman Edo sendiri berlangsung dari 1603-1866, dan politik isolasi mulai diberlakukan pada tahun 1633 yaitu pada masa kepemimpinan Tokugawa Iemetsu (*Shogun* ke-3). Dalam ketetapanannya Jepang dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar kecuali untuk pedagang Cina dan Belanda melalui pelabuhannya di Nagasaki dan Desima. Pada saat menjalani masa politik isolasi ini masalah-masalah hubungan luar negeri tidak diperhatikan oleh Jepang, namun sebelumnya kontak-kontak penting antara Jepang dengan dunia luar terjadi untuk pertama kalinya pada abad ke 7 dan 9 antara tahun 607-838, yaitu ketika pemerintahan Jepang melakukan upaya-upaya ambisius untuk mempelajari dan menerapkan berbagai bidang ilmu dari Negara Cina yang pada saat itu merupakan salah satu Negara yang telah mengalami kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pengetahuan terlebih dulu.¹

Kegiatan hubungan luar negeri ini kemudian terputus berabad-abad sampai terjadinya dua serangan yang gagal yang terjadi pada zaman Kamakura (yaitu zaman feodal awal yang terletak di daerah Kamakura pada tahun 1192-1333), yang menyerang wilayah Kyushu pada tahun 1274 dan

¹ Prof. Dr. I Ketut Surajaya M.A, *Pengantar Sejarah Jepang I*, Jakarta 2001

tahun 1281, oleh orang-orang Mongol yang saat itu menguasai Cina oleh Kubilai Khan yang mengorganisir pasukannya untuk menyerang kepulauan Jepang, Rusia dan sebagian Timur Tengah. Serbuan tersebut gagal dikarenakan kondisi cuaca, yaitu terjadinya angin topan yang akhirnya dipercaya oleh orang Jepang sebagai Dewa Angin. Berdasarkan kepercayaan orang Jepang itulah akhirnya angin topan yang berhasil menggagalkan serangan dari Kubilai Khan tersebut disebut dengan *Kamikaze* atau angin suci.²

Pada zaman sesudahnya yang disebut dengan zaman *Muromachi*³, Jepang berhasil menguasai semua propinsi yang berada di Jepang Tengah. Yaitu pada masa kepemimpinan Ashikaga Yoshimitsu yang berhasil mengadakan hubungan dagang dengan kekuasaan dinasti Ming di Cina. Produksi dalam negeri menjadi meningkat dan terjadi perbaikan di sektor pertanian. Kemudian pada tahun 1542 datanglah untuk pertama kalinya para pedagang Portugis dan biarawan Jesuit di Kyushu. Mereka memperkenalkan dua hal baru kepada masyarakat Jepang yaitu senjata dan agama Kristen. Tokoh terkenal yang menjadi pelindung agama Kristen ini adalah Oda Nobunaga yang merupakan pemimpin (*Udaijin*) pada zaman yang dikenal dengan nama *Azuchi Momoyama*.⁴ Perlindungan yang diberikan oleh oda nobunaga ini tidak lain adalah karena Nobunaga ingin melancarkan hubungan perdagangan luar negerinya yang pada waktu itu didominasi oleh bangsa Eropa.

Setelah wafatnya Oda Nobunaga, kepemimpinan digantikan oleh pengikut Oda yaitu Toyotomi Hideyoshi. Pada masa kepemimpinan Hideyoshi inilah penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa dilarang. Menurut Toyotomi kebijakannya tersebut diambil karena agama Kristen di Jepang dianggapnya telah

mengganggu orientasi penyatuan negeri, dan adanya kecurigaan Hideyoshi terhadap dominasi orang-orang Eropa pada waktu itu.

Setelah Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, kemudian muncullah penguasa baru dari keluarga Tokugawa, yaitu Tokugawa Ieasu yang muncul sebagai penguasa baru setelah kemenangannya dalam perang *Sekigahara* mengalahkan keluarga Mitsunari yang merupakan pendukung dari keluarga penguasa terdahulunya Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1600. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya Ieasu memiliki pandangan yang sama dengan pendahulunya Hideyoshi mengenai pelarangan masuknya agama Kristen, yang kemudian pada masa Tokugawa ini ditetapkan menjadi peraturan nasional pada tahun 1612. Larangan agama ini kemudian disusul dengan adanya pelarangan orang Jepang ke luar negeri pada tahun 1635. Kebijaksanaan lainnya yaitu mengetatkan pengawasan dagang dengan Negara lain pada tahun 1639. Bangsa Eropa yang diizinkan berdagang ke Jepang hanyalah orang Belanda melalui kantor dagangnya di Dezima dan Nagasaki. Kebijakan isolasi inilah yang kemudian dikenal dengan nama *Sakoku* (Politik Isolasi).

Dengan mengamati perubahan dan perkembangan dari perjalanan sejarah politik Jepang, khususnya di zaman Edo yaitu zaman dimana Jepang menarik diri dari pergaulan internasional melalui politik isolasinya, maka sangat menarik untuk melihat bagaimana pengaruh dari masa isolasi tersebut terhadap rasa nasionalisme bangsa Jepang khususnya sampai pecahnya Perang Dunia I dan II. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan politik isolasi Jepang pada masa Edo dan menganalisa pengaruhnya terhadap rasa nasionalisme Jepang pada masa berlangsungnya Perang Dunia.

1.2 Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk meneliti pengaruh politik isolasi Jepang terhadap nasionalisme bangsa Jepang, peneliti akan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri. Karena politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari kepentingan yang ingin dicapai dari politik dalam negeri itu sendiri, sehingga keduanya akan saling berkaitan satu sama lain. Kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau (2005:49) yaitu; upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya diajukan untuk memelihara dan

² Mengenai *Kamikaze* lihat; Rikihie, Inoguchi, Roger Pineau, *Kisah Para Pilot Kamikazze (Pasukan Udara Berani Mati Jepang Pada Perang Dunia II)*, Komunitas Bambu, Depok, 2008, hal.17

³ *Muromachi* adalah zaman dengan sistem pemerintahan militer kedua setelah Kamakura, nama ini diambil dari nama markas besar di salah satu bagian kota Kyoto. Mengenai zaman *muromachi* ini dapat dilihat di; John Whitney Hall, *The Cambridge History of Japan (Volume 3 Medieval Japan)*, USA Cambridge University Press, 2008, hal. 183

⁴ *Azuchi Momoyama* adalah Nama zaman yang diberikan berdasarkan kastil yang dibangun oleh kedua tokoh pemimpin di masa itu, kastil Azuchi yang dibangun oleh Oda Nobunaga dan kastil Momoyama yang dibangun oleh Hideyoshi. Mengenai Azuchi Momoyama lihat; Kenneth G Henshall, *A History of Japan (From Stone Age to SuperPower, 2nd edition)*, Palgrave Macmillan, New York, 2004,hal.45

mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas nasional, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa.⁵

Pengertian dasar dari kata Politik itu sendiri adalah; Bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik dengan kata lain politik adalah bahasan dan renungan atas;⁶

- a) Tujuan dari kebijakan politik
- b) Cara-cara mencapai tujuan itu
- c) Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu
- d) Kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Sebagai upaya untuk mencapai dan memelihara identitas nasional yang kuat pemerintah suatu negara akan berupaya melakukan berbagai cara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya agar tercipta dan tercapai dari apa yang menjadi tujuan dan sasaran pemerintah tersebut. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri suatu negara akan berpengaruh terhadap apa yang menjadi kepentingan dan sasaran yang ingin dituju oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan dalam negerinya. Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 849), merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Nasionalisme menurut menurut Erica Banner (*Nasionalisme in Japan*; 2006: 11) mempunyai arti sebagai sebuah kesamaan identitas nasional yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga kesadaran nilai kesetiaan itu timbul karena adanya rasa persamaan satu sama lain. Selanjutnya Erica Banner juga menyatakan bahwa sebuah rasa nasionalisme tidak hanya dipersatukan oleh pemerintahannya, karakter-karakter yang menjadi simbol negaranya, kerajaan yang memimpinnnya tetapi nasionalisme menempatkan nilai yang jauh

lebih tinggi lagi yaitu nilai persamaan baik itu dari faktor geografi, etnis, ideologi dan sebagainya yang menimbulkan identitas yang kuat.

Di Eropa nasionalisme terjadi pada masa peralihan dari masyarakat feodal menuju masyarakat industri. Kekuasaan kaum feodal mulai surut dan digantikan oleh para borjuis kota. Mereka tidak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam masyarakat agraris, tetapi mereka ingin bebas melakukan usaha, bersaing dan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Di tengah-tengah keadaan demikian itulah lahir nasionalisme Eropa Barat. Nasionalisme ini tumbuh menjadi suatu aliran yang penuh emosi dan sentimen sehingga nasionalisme Barat melahirkan kolonialisme, yaitu mencari jajahan di luar benuanya sendiri.⁷

Ketika Jepang mengakhiri masa feodalnya dengan menghapuskan politik isolasi yang telah berlangsung selama 250 tahun lamanya, rasa ketertinggalan dan cita-cita untuk menjadikan Asia Timur Raya berada di bawah kepemimpinan kaisar Jepang telah menjadi alasan utama yang menjadikan Jepang turut serta menjadi salah satu negara agresor, yaitu dengan upaya memperluas wilayahnya sampai ke luar benuanya seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa.

Menurut Hans Kohn (2001:7-8), yang lebih cenderung mendefinisikan nasionalisme pada sentimen nasional mengatakan bahwa;

"a state of mind, permeating the large majority of a people, and claiming to permeate all its members; it recognises the nation state as the ideal form of political organisation and the nationality as the source of all creative cultural energy and economic well being. The supreme loyalty of man is therefore due to his nationality, as his own life is supposedly rooted in and made possible by its welfare".⁸

Berdasarkan hal tersebut "Nasionalisme Jepang" sering juga dianggap berada di bawah pengaruh bangsa Eropa yang pada masa Perang Dunia I dan II melakukan kebijakan ekspansi, untuk itu identitas nasional yang dipengaruhi oleh pemikiran mengenai kesetiaan, patriotisme, dan bahkan sikap anti asing menjadi sebuah doktrin yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk melindungi keamanan nasional bangsa Jepang pada waktu itu.

⁵ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 49

⁶Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*; (PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta,2005),hal.30

⁷ Prof. Dr. Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 6

⁸ *Ibid*, hal.7 dan 8

Hal ini seperti terlihat dalam pernyataan Aizawa Seishisai seorang penulis mengenai Cina klasik, dalam pernyataannya dia menyatakan;

*"The great powers dividing up the earth. Today we find ourselves alone in a hostile world; we defend a solitary castle under attack by enemies who erect fortresses along our borders....This is the world situation facing us today. We must adjust to it and remain flexible enough to deal with constantly changing conditions. At home we must set up adequate defenses; in foreign policy, we must counteract the enemy's stratagems in advance"*⁹

Kebijakan politik luar negeri yang diberlakukan oleh penguasa Jepang untuk mencapai kepentingan dalam negerinya pada zaman Edo (masa feodalisme Jepang) yaitu dengan memberlakukan kebijakan politik isolasi atau *sakoku*. *Sakoku* berasal dari kata 'kusari' : yang artinya rantai atau belenggu, dan 'kuni' : yaitu negara. Dapat disimpulkan bahwa *sakoku* merupakan masa membelenggu atau merantai negara Jepang dari pengaruh bangsa lain yang diberlakukan pada masa pemerintahan *Shogun* Tokugawa karena kekhawatirannya terhadap masuknya ajaran Kristen yang dibawa oleh para pedagang, yang dinilai sebagai ancaman terhadap persatuan negeri. Isi dari politik *sakoku* ini yaitu melarang orang Jepang melakukan perjalanan ke luar negeri dan melarang kapal asing memasuki wilayah Jepang. Kebijaksanaan ini diberlakukan selama kira-kira 215 tahun sejak tahun 1639 hingga tahun 1854. Selama diberlakukannya politik *sakoku* itu hanya kapal dari Belanda dan China yang dapat memasuki pelabuhan dagang Jepang di Nagasaki dan Dezima.

Kebijakan –kebijakan politik yang berlaku pada masa feodal ini memiliki keunikan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik luar negeri Jepang di masa sekarang. Dengan melihat sejarah politik bangsa Jepang di masa lalu maka akan mempermudah untuk memahami karakter dan budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang saat ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan-kebijakan yang Berlaku Selama Masa Isolasi Jepang

Politik isolasi (*sakoku*) menurut Holsti (1992:86) "adalah sebuah cara yang dilakukan suatu negara untuk menutup diri dan berusaha untuk tidak menarik perhatian luar demi melindungi kepentingan negaranya." Politik luar negeri dengan cara isolasi merupakan cara bertahan yang dilakukan Jepang untuk membentuk masyarakat Jepang agar memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintahan Jepang terutama Kaisar Jepang dan sebagai upaya pemerintah Jepang dalam menjauhi pengaruh masyarakat Jepang dari dunia luar, sehingga membentuk Jepang menjadi negara feodalisme yang kuat. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa politik isolasi tersebut berlangsung;

2.1.1 Para *Daimyou* (Pemimpin Daerah)

Secara spesifik kebijakan-kebijakan yang berlaku pada zaman Edo hampir sama seperti kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya yaitu institusi yang didirikan oleh Oda dan diteruskan oleh Hideyoshi, tetapi kemudian Ieasu menyusun kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih sistematis dan menetapkan beberapa kebijakannya sebagai falsafah nasional. Bagi Ieasu Kelangsungan hidup dari para *daimyou* ini merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian utama, karena berdasarkan sejarah setiap pemberontakan dan pertempuran yang terjadi pada masa-masa sebelumnya selalu melibatkan kekuatan dari para *daimyou*. Dengan begitu Ieasu meminta para *daimyou* untuk memberikan pengabdian penuh dan kesetiaan kepadanya. Ieasu melarang para *daimyou* untuk membentuk aliansi antar sesamanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penghianatan ataupun penyerangan dari kelompok-kelompok yang ingin menyerangnya. Lebih jauh lagi Ieasu memberikan kontrol penuh terhadap setiap pernikahan para *daimyou* yang harus berada dibawah persetujuannya. Dari kebijakannya ini Ieasu mencoba belajar dari kegagalan-kegagalan yang telah dilalui oleh kedua pelopor sebelumnya.

Kemudian pada masa generasi Tokugawa ke-3, Tokugawa Iemitsu membentuk badan pengawas untuk mengawasi seluruh *daimyou* di seluruh negeri yang disebut *Mitsuke*. Selain itu Iemitsu juga mendirikan badan pengawas untuk mengawasi kuil-kuil Buddha di seluruh negeri yang disebut *Jishabugyou* dan *Kanjobugyou* untuk mengawasi urusan tanah dan keuangan militer. Pada zaman

⁹ Erica Banner, *Nationalism In Japan Edited by Naoko Shimazu, "Japanese National Doctrines In International Perspective"*, Routledge, New York, 2006, hal.19

Edo sistem pemerintahan yang berlaku disebut dengan sistem *bakuhan*. *Bakuhan* adalah singkatan dari *bakufu* dan *han*, *han* yaitu sama dengan *daimyou-an* atau para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengawasi daerah atau disebut juga dengan sistem pemerintahan semi otonomi yang bertugas mengawasi daerah administratif atau propinsi. Pemerintahan *bakufu* (militer) bertindak sebagai pemerintah pusat.¹⁰

Pada zaman Edo, jumlah para *daimyou* berkisar antara 260-270 orang, para *daimyou* ini dibagi atas tiga golongan oleh Tokugawa yaitu; *Sinpan daimyou*, yaitu para *daimyou* yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Tokugawa; *Fudai daimyou*, yang merupakan pengikut Ieasu yaitu Tokugawa pertama; dan *Tozama daimyou*, yaitu *daimyou* yang diangkat oleh Ieasu pada waktu meletusnya perang *Sekigahara*. Untuk menghindari perebutan kekuasaan dan memperkuat pertahanan Tokugawa menempatkan para *daimyou* yang paling setia di sekitar wilayah Edo, dan para *daimyou* yang diragukan kesetiannya ditempatkan di wilayah-wilayah yang letaknya agak jauh dari Edo seperti di Kyushu dan Hokkaido.¹¹

Peraturan lain yang ditetapkan untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemimpin daerah ini adalah, ditetapkannya peraturan *Sankin kotai*, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa para *daimyou* beserta anak dan istrinya harus menetap di Edo dan di daerah administratifnya secara bergiliran dalam waktu satu tahun.¹² Sementara *daimyou* pergi ke daerah administratifnya anak dan istrinya harus menetap di Edo. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengontrol para *daimyou*nya, dengan jalan ini maka tidak ada kesempatan bagi para *daimyou* untuk menghimpun kekuatan ataupun melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan pemerintah karena istri-istri dan anak-anak dari para *daimyou* tersebut berada dalam kendali pemerintah pusat di Edo.

Berikut adalah beberapa point peraturan yang diberlakukan pada masa politik isolasi berlangsung;¹³

1. tidak ada seorang pun yang diijinkan untuk berpindah tempat tinggal
2. Semua kasus kriminal harus diadili dan dihukum.
3. Semua pernikahan yang melibatkan *daimyou* harus seijin Tokugawa.
4. Tidak diperbolehkan sama sekali membangun kastil baru, dan bahkan untuk memperbaiki kastil yang sudah ada harus seizin Tokugawa.
5. Apabila menemukan sebuah upaya konspirasi dari lapisan masyarakat manapun harus segera dilaporkan.
6. Para *daimyou* harus mengikuti urutan kepangkatan yang telah ditentukan.
7. Para *daimyou* harus mengikuti aturan seragam yang telah ditentukan.

Selain peraturan-peraturan yang dibuat khusus untuk mengawasi para pemimpin daerah tersebut, untuk menghindari pemberontakan dan memperketat pergerakan masyarakatnya Tokugawa juga membuat beberapa peraturan yang berlaku untuk mengawasi seluruh populasi masyarakatnya. Berikut adalah beberapa peraturan tersebut;¹⁴

1. Memeriksa setiap perjalanan, dengan badan administrative khusus dimana setiap penduduk wajib untuk memperlihatkan kartu izin perjalanan kepada pihak setempat.
2. Melarang masyarakat untuk pergi keluar pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, khususnya di tempat yang bukan wilayah tempat tinggalnya.
3. Membentuk polisi rahasia untuk melaporkan atas pergerakan manapun yang mencurigakan.

2.1.2 Kekaisaran

Menurut sejarah, Jepang telah disatukan oleh kerajaan Yamato yang pemimpinnya dipercaya memiliki kekuatan magis sebagai keturunan dari dewi matahari. Berdasarkan hal itulah kemudian Jepang mengawali masa pemerintahannya sebagai Negara monarki yang berturut-turut di pimpin oleh seorang kaisar dari tahun 250 sampai 1185. Namun pada kenyataannya peran dan fungsi kaisar sebagai penguasa pada zaman monarki ini mengalami pasang surut dan berbagai kendala, baik dari pihak bangsawan maupun para pendeta Buddha yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya mempelajari berbagai ilmu dari Cina dan berusaha menerapkannya dalam berbagai bidang. Dan ketika memasuki zaman feodal peran dari kaisar pun semakin terabaikan, sehingga berbagai cara dan

¹⁰ Andrew Gordon, *A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to The Present*, Oxford University Press, 2003. hal. 13

¹¹ Ryuugakusei no Tameno Nihonshi (*Japanese History An Introductory Text*, Tokyo gaikugodaigaku (Tokyo University of Foreign Studies) 2004, hal.88

¹² *Loc. cit.*

¹³ Kenneth G. Henshall, *op. cit.* hal. 53

¹⁴ *Ibid.* hal. 55

upaya dilakukan dari pihak istana untuk terus berusaha mengembalikan wewenang dan kekuasaan ke tangan kaisar.

Pada zaman Edo ini untuk menghindari berbagai upaya pemberontakan yang mungkin dapat dilakukan baik dari pihak istana maupun dari kalangan pendukung kaisar, maka pihak pemerintah mengeluarkan peraturan lain tentang pengaturan istana Kyoto. Peraturan yang dikeluarkan oleh Tokugawa ke-2, Hidetada ini dikenal dengan nama *Kinchu Narabaini Kuge Shohatto*. Isi dari peraturan ini diantaranya adalah ketidakbolehan kaisar untuk melibatkan diri dalam kehidupan politik dan tugasnya adalah memperdalam ilmu dan kebudayaan Jepang; dan kenaikan pangkat para bangsawan istana harus atas izin bakufu; para pemimpin daerah dilarang memasuki atau menghadap langsung kaisar di istana Kyoto, agar kaisar tidak berkomplot dengan para pemimpin daerah.¹⁵

2.1.3 Sistem Pelapisan Sosial

Seperti kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya yaitu Oda dan Toyotomi, sistem pelapisan yang telah dicanangkan oleh kedua pendahulunya tersebut pada zaman Edo diketatkan kembali. Masyarakat dibagi menjadi empat kelas sosial, yang disebut dengan *Shinokosho*¹⁶ yang merupakan singkatan dari *shi* artinya *bushi* atau militer, *noo* artinya *noomin* atau petani, *Koo* artinya *koosakunin* atau tukang, dan *sho* artinya *shonin* atau pedagang. Dan dibawah kelas ini disebut dengan *eta* dan *hinin* yang dianggap sebagai kelas terendah yang mungkin dapat disamakan dengan kaum budak.

Kelas militer juga dibagi menjadi tiga kelas; *shogun* yang merupakan kelas militer teratas; lapisan berikutnya *gokenin*; kemudian kelas dibawahnya disebut *Asigaru*. Kemudian untuk kelas petani dibagi menjadi dua lapisan yaitu; tuan tanah yang memiliki tanah luas sendiri dan kelas petani penyakap, termasuk petani miskin atau buruh tani. Seperangkat peraturan juga dikeluarkan untuk kelas petani. Yaitu para petani dilarang berpindah tempat tinggal; dilarang menjual ladang atau sawahnya, dilarang pindah pekerjaan, dilarang menanam ladang dan sawahnya dengan tanaman-tanaman lain kecuali yang sudah ditentukan oleh pemerintah, wajib menyeter pajak kepada

pemerintah sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.¹⁷

Tujuan utama ditetapkannya sistem pelapisan sosial yang ketat ini ialah untuk melaksanakan pengawasan feodal militer secara ketat. Seseorang tidak diperbolehkan menukar status kelasnya, sehingga sistem pelapisan sosial ini berlaku secara turun temurun. Seseorang juga dilarang melakukan perkawinan campuran, sehingga diskriminasi sosial sangat tajam di masyarakat Tokugawa ini.

Michael Yoshino (1971), yang telah dikutip kembali oleh Iwan Setiawan S (2004; 99) di dalam pernyataannya menjelaskan bahwa;

“Tokugawa feudalism was known as central feudalism in that the regime ruled the nation through nearly three hundred regional lords who in turn, commanded their own retainers and commoners. The Tokugawa regime firmly controlled these feudal fiefdoms through a skill full doling out of awards and punishments and a clever application of rigid, detailed and elaborate devices for control. Of all the ingenious devices employed by the Shogunate perhaps none was more important than its attempt to freeze the society into a legally immutable class structure by classifying the entire populace into the rigid heredity hierarchy of statuses. Below the imperial household and court nobles, four classes were established in the following status order; warriors, farmers, artisan, merchants. “

2.1.4 Ideologi masyarakat Tokugawa

Pada masa Tokugawa Bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya “falsafah nasional” bangsa Jepang yang digunakan sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut “*kokutai no honggi*” (prinsip dasar negara), dimana prinsip tersebut menempatkan Kaisar sebagai penguasa negara yang merupakan keturunan langsung dari *Amaterasu (Dewa)*.¹⁸

Selain dari pada itu pada era Tokugawa ini, pemikiran-pemikiran konfusianisme disusun secara sistematis dan kemudian diadopsi menjadi ajaran dasar dalam menyelesaikan permasalahan politik dan juga sosial yang dihadapi bangsa Jepang. Murayama (1982: 108), mengatakan bahwa pada

¹⁵ Andrew Gordon, *op. cit.* hal. 14

¹⁶ *Ibid.* hal.16

¹⁷ Ryuugakuseino tameno nihonshi, *op. cit.* hal.89

¹⁸ Abdul Irsan, *Budaya dan perilaku politik Jepang di Asia*, 2007, hal. 47

masa Tokugawa pemerintah Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran konfusianisme, doktrin ini memberlakukan hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara yang isinya antara lain:

1. Kepentingan pemerintah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sehingga rakyat harus bersedia untuk berkorban demi kepentingan nasional;
2. Pemerintah selalu berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada kedudukan individu. Sehingga jika rakyat ingin maju harus patuh dan mengikuti peraturan pemerintah;
3. Pemerintah adalah abdi masyarakat. Apabila rakyat menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan pemerintah, agar disampaikan secara langsung, jelas dan santun;
4. Kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. Untuk itu setiap individu masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan pemerintah;
5. Doktrin kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, pejabat dan pegawai pemerintah, tetapi juga bagi rakyat secara keseluruhan.

Ajaran konfusianisme tersebut yang kemudian melandasi kesetiaan masyarakat Jepang terhadap pemerintah Jepang, dan doktrin ini dianggap telah berperan dalam membentuk karakter masyarakat Jepang dalam membangun pertahanan diri yang kuat dan juga sangat efektif untuk menjaga kelangsungan kekuasaan pemerintah Jepang. Doktrin tersebut juga dilengkapi dengan etika samurai (*Bushido*) yang didalamnya terkandung nilai; kesetiaan, rela berkorban, disiplin, jujur dan pantang menyerah.

Menurut Yamaga Soko (Kenneth G Henshall: 2004:61) seorang penulis dari karya *Hagakure (in the shadow of leaves)* pada tahun 1716, dan *Gorin no Sho (the five rings)* pada tahun 1643. yang dalam setiap tulisannya menekankan pentingnya pilosopy dari *Bushido* yang merupakan aspek terpenting yang harus dimiliki oleh seorang *samurai* (prajurit) mengatakan;

"Confucianists were very much concerned with knowing one's place, honouring relationship, respecting order, and doing one's duty. Because of this values, Confucianism was revived and promoted by the Tokugawa shogunate."

Dengan demikian nilai-nilai *Bushido* yang dipegang oleh kaum samurai dipengaruhi oleh ajaran Budha dan konfusianisme yang dikembangkan ke seluruh lapisan masyarakat pada masa Shogun Tokugawa. Konfusianisme di Jepang itu dikembangkan untuk memperkuat posisi *Shogun* dalam masyarakat militer, maka ciri khas konfusianisme Jepang adalah sifat nasionalisnya. Pada masa isolasi (*sakoku*) konfusianisme merupakan ajaran pokok yang mempertebal etos "Nasionalisme Jepang". Kelas samurai secara sangat sadar dipandang sebagai perwujudan dan penjaga moralitas. Tokugawa Mitsukuni, seorang pangeran ketiga dari Mito, menulis perintah untuk para pengikutnya yang isinya adalah sebagai berikut,

*"what, then, the use of the (shi), or (samurai) class? Its only business is to preserve, or maintain giri, the people of the other classes deal with visible things, while the samurai deal with invisible, colorless, unsubstantial things...., if there were no samurai, right (giri) would disappear from human society, the sense of shame will be lost, and wrong and injustice would prevail."*¹⁹

Dan menurut Kawakamu Tasuke "*Bushido*" yang pada awalnya berkembang dari kebutuhan-kebutuhan praktis para prajurit, selanjutnya dipopulerkan oleh ide-ide moral konfusius tidak hanya sebagai moralitas kelas prajurit tetapi juga sebagai landasan moral nasional". *Bushido* juga merupakan rangkuman nilai-nilai dasar orang Jepang dan juga karena baik pada masa Tokugawa maupun zaman modern etika *Bushido* paling tidak sebagian besar darinya telah menjadi etika nasional.

Berikut adalah pernyataan Kawakamu Tasuke, mengenai *Bushido* sebagai etika moral;

*"Bushido which had originally developed from the practical necessities warriors, come to be popularized by confucian moral ideas, not only as the morality of the warrior class but as the cornerstone of national morals."*²⁰

Kemudian Micheal Y. Yoshino dalam *Japan's Managerial System* (1971), yang telah di kutip

¹⁹Robert N.Bellah, *Tokugawa Relegion (The Culture Roots of Modern Japan)*, Collier Macmillan Publishers, London, 1985. hal.90

²⁰ *Loc. cit.*

kembali oleh Iwan Setiawan S. Juga Menyatakan bahwa;

*”in traditional Japanese society, Bushido was tremendously important, not only because it served as the official code of ethics for the samurai class, but also because it became the ethic of the entire Tokugawa society.”*²¹

Dengan diberlakukannya etika *Bushido* sebagai moral bangsa bagi seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintahan keluarga Tokugawa pada masa Edo ini berharap bahwa hal tersebut dapat membentuk karakter bangsa Jepang dengan sistem feodal yang kuat sehingga kelangsungan kekuasaannya dapat bertahan lama.

Nilai-nilai *Bushido* tersebut antara lain mencakup, Keberanian. Keberanian ini dapat dilihat dari sikap orang Jepang dalam mempertahankan kelompoknya (pengaruh “sistem *ie*”)²². Berdasarkan sistem tersebut orang Jepang bahkan bersedia mati untuk membela kelompoknya. Selain itu di dalam etika prajurit (*Bushido*) juga mengandung nilai-nilai seperti; Ketabahan hati, Setia pada tugas dan sumpah, Memegang teguh janji kehormatan, Tidak mengenal takut dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Rela menjalani hukuman mati secara mulia (*seppuku* atau *harakiri*). Sikap ini sangat terkait dengan nilai-nilai *Bushido* lainnya. Apabila pada suatu ketika dimana orang Jepang merasa tugas yang dijalankannya gagal, ia merasa bertanggung jawab dan sangat malu. Sebagai konsekuensinya, ia rela menjalani hukuman mati dengan melakukan *seppuku* atau *harakiri* demi menjaga nama baik dirinya dan lembaga tempatnya mengabdikan. Ia lebih memilih mati, karena masyarakat Jepang menganggap mati lebih terhormat daripada hidup menanggung malu. Selain daripada ideologi konfusianisme, dan etika *Bushido*, ajaran Shintoisme juga merupakan ajaran tradisional Jepang yang didalamnya banyak mengajarkan

mengenai nilai-nilai kesetiaan pada kaisar atau pemimpin dan hormat pada arwah leluhur.²³

Mengenai rasa kesetiaan yang berkaitan erat dengan ketaatan kepada orang tua dan kaisarnya dapat dilihat dalam pernyataan dari Mitsukuni-sama berikut ini:

”Setiap orang menyadari bahwa orang yang tidak tahu membalas budi kepada orang tuanya juga akan abai terhadap kepentingan pangerannya (kaisar), bahkan terhadap kemanusiaan, dan jelas ia bukan samurai yang terhormat.”²⁴

Ajaran yang terkandung dalam ”jalan samurai” yaitu selaras dengan pengabdian tanpa pamrih, yang diketahui merupakan kewajiban tertinggi. Yang didalamnya menekankan kesetiaan dan ketaatan kepada leluhur dan orang tua, serta pengabdian tanpa pamrih kepada atasan. Pada masa isolasi ini, ideologi *Bushido* sudah menjadi ajaran moral bagi seluruh anggota masyarakatnya, sehingga tentunya dengan diberlakukannya hal tersebut sangat memudahkan Shogun Tokugawa dalam menjalankan pemerintahannya agar sesuai dengan harapannya.

Berikut adalah sebgai kutipan dari *hagakure (in the shadow of leaves)*, yaitu suatu lambang patriotisme *Bushido*;

”dimana pun kita berada, jauh di curuk gunung atau terkubur dalam di bawah tanah, kapan saja atau di mana saja, kewajiban kita adalah menjaga kepentingan pangeran kita. Ini adalah kewajiban setiap laki-laki. Ini adalah tulang punggung kepercayaan kita, tak akan pernah berubah dan selamanya benar. Tidak pernah dalam hidupku aku menempatkan pikiranku sendiri di atas pikiran pangeran dan junjunganku. Dan aku tidak akan pernah melakukannya di sepanjang hari dalam hidupku. Bahkan kalau aku mati aku akan kembali hidup tujuh kali untuk menjaga rumah tinggal pangeranku”

²¹ Iwan Setiawan S, *Konsensus Nemawashi dan Ringi (Budaya Manajemen Jepang Membangun Produktivitas Kerja)*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta, 2004. hal.98

²² System “*ie*” adalah sistem keluarga tradisional Jepang yang tidak hanya mengatur keluarga tetapi kelompok atau golongan dalam masyarakat tertentu. Mengenai sistem “*ie*” lihat Disertasi Ekayani R.M Manulang Tobing. *Konsep keluarga Jepang Dewasa ini; suatu kajian tentang pelestarian dan Perubahan dalam Sistem Keluarga Jepang*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.1999

²³ Matsumae Takeshi and Sonoda Koyu, *The Cambridge History of Japan Volume I*, Cambridge University Press, New York, 2008, 328-388

²⁴ Robert N.Bellah, *op. cit.* hal. 93

”kita telah bersumpah untuk melakkan 4 hal, yaitu;

1. kita tidak akan pernah kalah dengan siapapun dalam pelaksanaan kewajiban kita.
2. kita akan membuat diri kita berguna bagi pangeran kita.
3. kita akan patuh kepada orang tua kita.
4. kita akan mencapai kejayaan dalam derma.²⁵

Didalam ajaran konfusianisme yang didalamnya terkandung pola hubungan yang bersifat hirarki, dan tata cara hidup seorang samurai terdapat ajaran yang dikenal bagi seluruh masyarakat Jepang yaitu ”ON” yang artinya bisa diartikan sebagai hutang, beban yang dipikul, atau kewajiban. Bagi orang Jepang kehidupan-kehidupan yang mereka terima baik besar ataupun kecil, sangat mustahil dapat mereka terima tanpa menyadari bahwa keuntungan-keuntungan yang telah mereka terima ini merupakan hutang yang diperolehnya secara pasif.

Dalam sejarah Jepang orang yang paling utama di antara sesamanya ini, kepada siapa seseorang berutang, adalah kepada atasan tertinggi dalam lingkup kehidupannya. Ketika pada zaman Edo berlangsung ruang ini ditempati oleh penguasa tertinggi Jepang yaitu *Shogun*. Yang kemudian pada masa Perang Dunia berlangsung diduduki oleh kaisar.²⁶

Ruth Benedict dalam, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni* (1982:125) memaparkan skema kewajiban-kewajiban bangsa Jepang dan pemenuhannya sebagai berikut;

1. *On*: kewajiban-kewajiban yang timbul secara pasif. Artinya on adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh si penerima yang pasif. Contohnya;
 - a) *ko on*: *on* yang diterima dari kaisar.
 - b) *oya on* : *on* yang diterima dari orang tua.
 - c) *nushi no on* : *on* yang diterima dari majikan atau tuan.
 - d) *shi no on* : *on* yang diterima dari guru
 - e) dan *on* yang diterima dalam semua hubungan dengan orang lain selama hidup si penerima.
2. pemenuhan *on*. Yaitu membayar kembali utang-utang ini; atau memenuhi kewajiban-kewajiban ini terhadap orang yang memberinya ”*on*”. Ada dua jenis pembayaran *on*.

- a) *Gimu* : yaitu pembayaran kembali yang maksimalpun dari kewajiban ini dianggap belum cukup, dan tidak ada batas waktu pembayarannya. Contohnya yaitu;
 - *Chu*: kewajiban kepada kaisar, hukum, dan negara.
 - *Ko*: kewajiban terhadap orang tua dan nenek moyang
 - *Nimmu*: kewajiban terhadap pekerjaan seseorang.
- b) *Giri* : utang-utang ini wajib di bayar dalam jumlah yang tepat sama dengan kebaikan yang diterima, dan ada batas waktu pembayarannya. Contohnya yaitu;
 - *giri* terhadap dunia yang meliputi;
 - kewajiban terhadap tuan pelindung
 - kewajiban terhadap sanak keluarga
 - kewajiban terhadap yang bukan keluarga.
 - *giri* terhadap nama seseorang, yaitu kewajiban seseorang untuk ”membersihkan” namanya dari penghinaan atau tuduhan atas kegagalan.
 - Kewajiban seseorang untuk tidak menunjukkan kegagalan atau ketidaktahuannya dalam melaksanakan tugas.
 - Kewajiban seseorang untuk mengindahkan sopan santun Jepang.

Kewajiban-kewajiban tersebut telah melekat bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang pada zaman Edo Tokugawa berlangsung. Pemahaman masyarakat Jepang dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya tersebutlah yang telah berhasil mewujudkan kepentingan shogun Tokugawa dalam memelihara kekuasaannya. Hal ini mempermudah pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat feodal Jepang yang tak terganggu selama 250 tahun lebih.

Berikut adalah beberapa point dari perkembangan selama pemerintahan Tokugawa dan nilai-nilai yang berlaku selama masa isolasi berlangsung.

Tabel 1. Kunci Perkembangan Pada Periode Tokugawa

Perkembangan	Perkiraan Waktu
Pendirian kembali sistem keshogunan	dimulai abad ke-17
Pengusiran orang Asing, dan penindasan Agama Kristen	Awal-Pertengahan abad ke 17
Kebijakan Shogun dalam mengendalikan semua wilayah	Pertengahan abad ke-17
Peran samurai berubah menjadi birokrat	Dari pertengahan abad ke-17

²⁵ *Ibid.* hal 91

²⁶ Ruth Benedict, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982. hal. 107

Perkembangan budaya borjuis baru	Dari pertengahan abad ke-17
Pengembangan nilai nasionalisme berdasarkan Shinto	Dari awal abad ke -18
Menghapus tingkat populasi, ekonomi berhasil dengan baik	Dari awal abad ke -18
Penyebaran pendidikan	Dari pertengahan abad ke-18
Orang Asing mulai "menggangu" lagi	Dari akhir abad ke-18
Peningkatan ketidakpuasan rakyat terhadap Shogun	Dari awal abad ke -19
Orang Asing kembali menekan, pembukaan negeri Jepang merasa dipermalukan	Dari tahun 1850
Samurai-samurai dari daerah luar menantang Shogun	Dari awal tahun 1800
Keshogunan yang dirobuhkan, dan pengembalian kekuasaan kepada kaisar	Akhir tahun 1860

Sumber: A History of Japan From Stone Age To Superpower (2004:21)

Tabel 2. Kunci Nilai-Nilai dan Praktek Pada Periode Tokugawa

Penyebaran dan penyesuaian nilai-nilai tradisional
Penyebaran kepatuhan keseluruhan lapisan dengan gagasan "kebebasan yang tidak melewati batas"
"secara moral kebebasan seks diperlonggar"
Pemberlakuan tanggung jawab kolektif dan tanggung jawab yang dipaksakan melalui pemberian hukuman yang berat.
Kehati-hatian terhadap Orang Asing, melalui pembentukan gagasan penguatan kelompok dalam dan kelompok luar.
Kegelimangan ekonomi, khususnya dikalangan petani.
Paham materialisme diantara banyak kalangan bukan samurai.
Melanjutkan pandangan hidup dengan cara yang relatif murah.
Penghargaan tinggi terhadap pendidikan.
Kebangkitan kembali ilmu konfusianisme yang "dijepangkan".
Mengidealisasikan tata cara samurai sebagai pegangan hidup.
Memperkuat rasa nasionalisme dengan gagasan pemberian perbedaan yang kuat antara Jepang dengan dunia yang lainnya.
Perasaan dipermalukan oleh kekuatan Barat.

Sumber: A History of Japan from Stone Age To Superpower (2004: 72)

Adapun beberapa dampak yang diakibatkan dengan diberlakukannya masa isolasi pada era Tokugawa ini adalah;

1. munculnya masa *genroku*, yaitu kegemilangan dalam karya sastra dan budaya Jepang.
2. angka produksi meningkat melebihi angka populasi.
3. kebutuhan akan beras yang meningkat menimbulkan munculnya tempat meminjam uang yang akhirnya mengakibatkan perekonomian yang tidak stabil.
4. stabilitas nasional berada dalam keadaan yang damai dan aman, karena faktor struktur politik yang dikendalikan penuh melalui politik isolasi.
5. pembagian kelas sosial yang dibentuk telah membantu mempertahankan kelangsungan kekuasaan dari para samurai dan pemerintah.²⁷

2.2 Definisi Operasional

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menguraikan arti istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3 Definisi Operasional

Makna Kata	Defenisi Operasional
Pengaruh	Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
Politik	Adalah suatu cara atau upaya dimana bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik dengan kata lain politik adalah bahasan dan renungan atas; a) Tujuan dari kebijakan politik b) Cara-cara mencapai tujuan itu c) Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu d) Kewajiban-kewajiban (<i>obligation</i>) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.
Sakoku	"dari kata ' <i>kusari</i> ' : yang artinya rantai atau belunggu, dan ' <i>kuni</i> ' : yaitu negara. Dapat disimpulkan bahwa sakoku merupakan masa membelunggu atau merantai negara Jepang dari pengaruh bangsa lain yang diberlakukan pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa karena kekhawatirannya terhadap masuknya ajaran Kristen yang dibawa oleh para pedagang, yang dinilai sebagai ancaman terhadap persatuan negeri. Isi dari politik sakoku ini yaitu melarang orang Jepang melakukan perjalanan ke luar negeri dan melarang kapal asing memasuki wilayah Jepang. Kebijaksanaan ini diberlakukan selama kira-kira 215 tahun sejak tahun 1639

²⁷ Kenneth G. Henshall, *op. cit.* hal. 65

	hingga tahun 1854. Selama diberlakukannya politik sakoku itu hanya kapal dari Belanda dan China yang dapat memasuki pelabuhan dagang Jepang di Nagasaki dan Dezima.
Isolasi	Sebuah cara yang dilakukan suatu negara untuk menutup diri dan berusaha untuk tidak menarik perhatian luar demi melindungi kepentingan negaranya.
Nasionalisme	Sebuah kesamaan identitas nasional yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga kesadaran nilai kesetiaan itu timbul karena adanya rasa persamaan satu sama lain. sebuah rasa nasionalisme tidak hanya dipersatukan oleh pemerintahannya, karakter-karakter yang menjadi simbol negaranya, kerajaan yang memimpinya tetapi nasionalisme menempatkan nilai yang jauh lebih tinggi lagi yaitu nilai persamaan baik itu dari faktor geografi, etnis, ideologi dan sebagainya yang menimbulkan identitas yang kuat.

III. PEMBAHASAN

Menurut Hirata Atsusane dalam *A History of Japan* (2004: 63) mengatakan bahwa, perasaan superior yang diajarkan dalam Shinto dan etika *Bushido* telah menjadi bagian yang menginspirasi semangat nasionalisme dan imperialisme bangsa Jepang di masa modern. Dalam penjelasannya Hirata menyatakan bahwa;

"The idealisation of the way of the samurai, the revival of Confucianism, the spread of education, and the emergence of nationalism were all to play a part in the formation of modern Japan."

Dengan demikian menarik untuk diamati adalah ketika perang berlangsung cara-cara yang dipakai setiap negara dalam menghadapi perang dan dalam melakukan agresinya tentu mempunyai latarbelakang yang berbeda dengan negara-negara lainnya baik dari segi tujuan maupun alasan.

Bagi Jepang sendiri sebagai bangsa yang tumbuh dengan sistem feodalisme, yang menekankan akan pola hirarki, Jepang memiliki pandangan perlu untuk melakukan perjuangan dalam memantapkan sistem hirarki dimana menurut pandangan bangsa Jepang merupakan suatu keharusan bahwa setiap manusia "harus mengambil tempat yang sesuai bagi masing-masing".²⁸ Setelah mencapai perjalanan yang panjang untuk mencapai kesatuan dan perdamaian dalam negerinya selama masa Tokugawa melalui politik isolasinya,

kemudian mereformasi sistem yang ada sesuai dengan perkembangan dunia melalui perbaikan struktur politik, ekonomi, dan pendidikan di era Meiji, sesuai dengan pemikiran Jepang tentang konsep hirarki yang sudah tertanam pada masa Edo, maka alasan Jepang ketika melakukan agresi kepada Cina adalah bahwa Jepang merasa perlu menyelamatkan negara tetangganya Cina yang dianggapnya perlu diselamatkan.

Selain pola hirarki yang tertanam puluhan tahun, kepercayaan tradisional tentang kesetiaan terhadap kaisar juga menjadi hal yang paling sering dijadikan slogan sebagai alasan Jepang melakukan perang. Pada tahun 1930-an Jenderal Araki, seorang militer fanatik dan mantan menteri Peperangan, menulis dalam selebaran yang ditujukan kepada "seluruh ras Jepang" yang isinya;

"bahwa misi Jepang yang sebenarnya adalah untuk menyebarkan memuliakan jalan kekaisaran sampai ke ujung empat lautan. Kurangnya kekuatan tidak perlu dicemaskan. Mengapa kita harus menghawatirkan hal-hal yang sifatnya materi?".²⁹

Dan hal tersebut juga dapat dilihat dalam pernyataan dari Perdana Menteri Jepang Jenderal Hideki Tojo pada bulan Juli 1943 yang menyatakan;

"dengan kepercayaan dan keyakinan kerajaan Dai Nippon menebalkan ketetapan hatinya dalam melaksanakan peperangan Asia Timur Raya untuk menghancurkan-luluhkan Amerika, Inggris dan Belanda."³⁰

Kemudian pada hari ketika terjadinya serangan atas Pearl Harbour, Duta-duta Jepang juga menyerahkan pernyataan yang tegas kepada Sekretaris Negara Amerika Cordell Hull yang isinya adalah;

"kebijaksanaan pemerintah Jepang yang tidak dapat diubah adalah untuk memungkinkan setiap negara menempati tempatnya yang sesuai di dunia...Pemerintah Jepang tidak dapat mentolerir berlangsungnya keadaan sekarang ini karena bertentangan langsung dengan

²⁹ *Ibid.* hal. 30

³⁰ P.K. Ojong, *Perang Pasifik*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hal.1

²⁸ Ruth Benedict, *op. cit.* hal.29

kebijaksanaan dasar Pemerintah Jepang yaitu untuk memungkinkan setiap negara menikmati tempatnya yang sesuai di dunia.”³¹

Kesetiaan kepada kaisar yang tanpa syarat dan tanpa pamrih juga penerapan sistem hirarki untuk menempati tempat yang sesuai yang telah menjadi dasar bagi pola pikir masyarakat Jepang selama berlangsungnya perang, bukan merupakan hal yang tercipta dalam kurun waktu yang singkat. Kepercayaan tradisional tersebut telah mengakar dalam karakter masyarakat Jepang selama ratusan tahun, yang tentunya hal tersebut akan sangat sulit untuk terbantahkan dengan nilai-nilai yang bersifat rasional sekalipun. dalam surat kabar terbesar Jepang yaitu Mainichi Shimbun sebelum terjadinya peristiwa Pearl Harbor menegaskan,

”bahwa bangsa Jepang akan menang, serunya, suatu kemenangan rohani atas jasmani. Amerika adalah negara besar dengan persenjataan yang unggul, tetapi apakah itu menjadi soal?, semuanya ini telah diketahui sebelumnya dan dianggap tidak ada. Kalau kita takut dengan angka matematis, maka perang tidak akan dimulai. Sumber-sumber kekayaan musuh tidaklah diciptakan oleh perang ini.”³²

Keuntungan yang dimiliki oleh bangsa Jepang adalah bahwa mereka telah tumbuh dari nilai-nilai yang selama ini tidak dapat diukur secara materi, yaitu nilai-nilai di luar rasionalitas manusia yang dipercayanya selama ratusan tahun ketika pertama kali pembentukan negara Jepang, seperti melalui kaisar yang dipercayanya sebagai titisan dari Dewa. Penekanan kesetiaan terhadap kaisar, yang ditujukan dalam rangka mewujudkan rasa kebangsaan yang kuat ini, kemudian tertulis dalam kitab *kokutai no hongii* yang pada masa Edo Tokugawa secara resmi dijadikan falsafah nasional yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. berikut ini adalah beberapa kutipan dari kitab *kokutai no hongii*:

”*The unbroken line of emperors, receiving the oracle of the founder of the nation, reign eternally over the Japanese empire. This is our eternal and immutable national entity.*”

*Thus, founded on this great principle, all the people, united as one great family nation in heart and obeying the imperial will, enhance the beautiful virtues of loyalty and filial piety. This is the glory of our national entity. The emperor is a 'deity incarnate' a 'direct descendant of Amaterasu', and serving him is 'not a duty as such, nor a submission to authority', but a natural manifestation of the heart.”*³³

Dengan demikian bagi masyarakat Jepang pemujaan yang mutlak terhadap kaisar yang dianggapnya sebagai titisan Dewa, merupakan hal yang sudah tertanam jauh sebelum berlangsungnya masa Perang Dunia I dan II. Tsurumi Shunsuke dalam (*An Intellectual History of wartime Japan 1931-1945*, 23), menyatakan bahwa ideologi yang tertera dalam *kokutai no hongii* telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pola pikir masyarakat Jepang sampai ke era modern dan khususnya sampai pecahnya perang dunia I dan II. Menurutnya;

”*The concept of kokutai or national structure derived from the fundamental Insularity and isolation of the Japanese. The concept served as a powerful linguistic weapon both for attack and defense in political arena of the period 1931-1945.*”

Kepercayaan dan keyakinan bangsa Jepang terhadap hirarki yang sudah tertanam semenjak zaman Edo Tokugawa ini akhirnya telah memberikan beberapa keuntungan-keuntungan bagi para elit pemerintahan Jepang modern yang sedang gencar-gencarnya berupaya menyamakan kedudukannya sebagai negara yang kuat seperti negara-negara Barat pada waktu Perang berlangsung. Kepercayaan tersebut memudahkan pencapaian yang ingin diraih oleh kepentingan sebagian elit pemerintahan Jepang pada waktu itu.

Hal tersebut dapat dilihat baik dari para negarawan sipilnya, komando tertingginya dan prajurit-prajuritnya yang selalu menegaskan bahwa perang ini bukanlah suatu pertandingan persenjataan, melainkan lebih dari itu yaitu perjuangan demi kepercayaan mereka akan hal-hal spritual yang tidak bisa diukur dengan materi. Para elit Jepang memanfaatkan kepercayaan tradisional ini untuk mencapai kejayaan Jepang dalam memenangkan perang-perangnya.

³¹ Ruth Benedict, *op. cit.* hal. 51

³² *Ibid.* hal. 30

³³ Kenneth G. Henshall. *op. cit.* hal. 115

Selama tujuh abad berlangsungnya feodalisme di Jepang, masyarakat Jepang sudah terbiasa dengan pola hirarki yang menuntut kesetiaan seseorang kepada tuannya yaitu *daimyou*, dan di atas itu, yaitu kepada pemimpin tertinggi militer yang disebut *shogun*. Kemudian kesetiaan di atasnya lagi yaitu adalah kepada kaisar Jepang, walaupun dalam perjalanan sejarahnya ia ditempatkan terasing dalam lingkungan yang terkucil, yang gerak-geriknya selalu diatur dan dibatasi oleh *shogun*. Namun kaisar bagi masyarakat Jepang dianggap sebagai jantung agama Shinto yang didalamnya banyak mengajarkan rasa kesetiaan dan rasa nasionalisme terhadap bangsa.

Di dalam pola hubungan hirarki, yang memiliki hirarki paling tinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi bawahannya. Sedangkan yang memiliki hirarki lebih rendah mempunyai kewajiban untuk patuh dan berkorban untuk atasannya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang bersifat timbal balik, yang artinya perlindungan diberikan karena adanya kepatuhan dan pengorbanan dan sebaliknya kepatuhan dan pengorbanan diberikan karena adanya perlindungan. Kewajiban timbal balik ini kemudian diberlakukan bagi seluruh masyarakat feodal Jepang seperti yang dijelaskan oleh David Magery Earl (1964), yang telah dikutip kembali oleh Budi Saronto (1997;110) sebagai berikut:

"The obligation /"ON" that we should repay are seven in number. The favor (on) of Amaterasu.....the favor (on) of heavenly Descendents (i.e. emperors).....the favor of the departed Lords, the favor of the present Lord, the favor of the ancestors, the favor of the parents, must be repaid. "

Jadi kewajiban untuk patuh dan berkorban yang telah diyakini oleh masyarakat Jepang selama berlangsungnya masa feodal yaitu mempunyai makna patuh dan berkorban demi Amaterasu (Dewi matahari), kaisar, nenek moyang, dewa-dewi, serta terhadap orang tua.

Idiologi yang diajarkan pada zaman Edo itu sendiri dipengaruhi oleh tiga macam pemikiran yaitu;

1. *Confucianisme Management School*
2. *Western Management School*
3. *Religious Management School*³⁴

³⁴ Budi Saronto, *mekanisme kerja keiretsu berdasarkan hirarki loyalitas keakraban (onjossshugi) dan patrimoni sesuai nilai-nilai kebudayaan orang jepang*, Depok Universitas Indonesia, 1997. Hal 112

Confucianisme management School merupakan pemikiran asli di zaman Edo. Ada empat buah keyakinan yang mendasari *confucianisme management* yaitu *confucianisme* itu sendiri, semangat keprajuritan atau yang dikenal dengan istilah *Bushido (the way of warrior)*, Buddhisme dan *Japanese Ways*. Yang dimaksud dengan *Japanese ways* disini adalah (*warm – hearted*) yang diilhami oleh agama tradisional Jepang yaitu Shinto. Hal inilah yang kemudian menjadi "*ancestor worship phylosophy*", dan menjadi dasar spirit bagi bangsa Jepang.³⁵

Buddhisme memberi spirit bagi tingkah laku orang Jepang yang selalu ingin mencapai kesempurnaan. *Confucianisme* memberikan apa yang disebut etos kerja yang didalamnya mengandung nilai kerajinan, kejujuran dan hemat. Semangat keprajuritan (*Bushido*) yaitu semangat yang patuh kepada komandan serta sikap berani mati demi membela komandan, yang kemudian ditransformasikan kedalam semangat patuh kepada negara dengan kewajiban menjalankan perintah komandan demi kepentingan negara di masa berlangsungnya Perang dunia I dan II.

Semangat keprajuritan yang telah dimiliki oleh masyarakat Jepang sejak zaman Edo tersebut juga dapat terlihat dalam sebuah syair lagu yang dinyanyikan oleh para pilot pasukan udara berani mati yang dimiliki Jepang pada perang Dunia ke II, yang terkenal patriotik dan dikenal dengan istilah *Kamikaze* (dewa angin) yang namanya terinspirasi dari kejayaan Jepang pada waktu terhindar dari serangan Mongolia pada tahun 1281. lagu ini dinyanyikan bersama-sama untuk membangkitkan semangat para prajurit yang akan berjuang pada waktu itu, berikut adalah petikan dari syair tersebut;

"jika saya pergi ke laut, saya akan kembali sebagai mayat yang terdampar, jika tugas memanggil saya ke gunung, padang rumput hijau akan menjadi penutup jenazahku, maka untuk kaisar... saya tidak akan mati dengan tenang di rumah"³⁶

Hal ini juga dapat dilihat dalam sebuah laporan terakhir dari Laksamana Ugaki dalam misinya sebagai pilot berani mati ke Okinawa;

³⁵ *Loc. cit.*

³⁶ Rikihie Inoguchi, Tadashi Nakajima, Roger Pineau, *op. cit.* hal.69

”saya akan melakukan serangan ke Okinawa dimana para prajurit saya telah berguguran seperti bunga ceri. Di sana saya akan menabrak dan menghancurkan musuh yang sombong dalam semangat *Bushido* sebenarnya, bersama keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap keabadian kekaisaran Jepang....., Panjang umur Yang mulia kaisar.”³⁷

Penekanan kesetiaan mutlak kepada kaisar merupakan nilai utama yang diajarkan dalam ajaran Shinto yang kemudian menjadi inspirasi bagi para anggota militer Jepang dan masyarakatnya dalam menghadapi situasi perang. Prinsip yang selama lebih dari ratusan tahun pada zaman Edo telah terbentuk dalam kode etik ksatria (*Bushido*), yang menekankan pada pentingnya kesediaan untuk mati setiap saat, baik itu untuk membela komandannya ataupun karena gagal dalam menjalankan tugas demi membersihkan nama baiknya yang dikenal dengan *Seppuku*, juga terlihat mewarnai semangat prajurit Jepang dalam menghadapi Perang. Seperti yang tertera dalam dalam catatan Laksamana Ohnisi sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara tradisional karena merasa telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dari pilot pasukan kamikaze, berikut adalah kutipannya;

”saya ingin mengungkapkan rasa penghargaan kepada jiwa para penyerang khusus yang pemberani. Mereka bertempur dan gugur dengan gagah berani dengan kepercayaan penuh terhadap kemenangan akhir. Dengan kematian, saya berharap dapat menebus peran saya dalam kegagalan untuk meraih kemenangan tersebut....., saya berharap generasi muda Jepang dapat menemukan pesan moral dalam kematian saya.....”

Dengan demikian menjadi tidak sulit bagi bangsa Jepang dalam memahami apa yang mendasari mereka ikut berperang, alasan-alasan yang sifatnya non-materi, memperjuangkan ”tempat yang sesuai”, memperjuangkan kejayaan kaisar sampai ke Asia Timur raya, atau untuk menyamakan kedudukannya dengan negara-negara Barat lainnya, tidaklah menjadi sedemikian sulit tanpa adanya nilai-nilai yang mengakar dalam budaya, pola pikir, dan sistem-sistem negara yang secara tradisional telah melekat dalam jiwa masyarakat Jepang.

Hal ini dapat diamati dari cara masyarakat Jepang dalam bersikap atau kebiasaan-kebiasaan dalam berperang seperti dalam melakukan serangan-serangan seperti serangan berani mati (*kamikaze*), atau melakukan bunuh diri ketika gagal dalam melaksanakan tugas atau dalam keadaan terpaksa menyerah (*seppuku*), dan perilaku-perilaku tertentu lainnya yang merupakan manifestasi dari ajaran *Bushido* atau etika samurai yang berlaku ketika zaman Edo berlangsung, yaitu mati secara terhormat untuk kaisar.

Kematian dengan cara terhormat ini menjadi tidaklah sulit bagi bangsa Jepang karena dalam ajaran shinto, dijelaskan bahwa arwah-arwah mereka yang gugur dalam membela negara dan kaisarnya akan kembali ke kuil dalam suasana persahabatan yang abadi. Kuil tersebut telah didedikasikan kepada para pahlawan tersebut yaitu dekat dengan Istana kekaisaran yang disebut dengan kuil Yasukuni.³⁸

Nilai-nilai tradisional yang sudah melekat tersebut akhirnya membentuk rasa nasionalisme bangsa Jepang yang tinggi, seperti pernyataan Erica Banner bahwa sebuah rasa nasionalisme tidak hanya dipersatukan oleh pemerintahannya, karakter-karakter yang menjadi simbol negaranya, kerajaan yang memimpinnya tetapi nasionalisme menempatkan nilai yang jauh lebih tinggi lagi yaitu nilai persamaan baik itu dari faktor geografi, etnis, ideologi dan sebagainya yang menimbulkan identitas yang kuat. Dengan begitu ideologi-ideologi yang diberlakukan selama masa Edo telah berperan dalam membentuk rasa persamaan antar sesamanya sehingga tercipta identitas bangsa yang kuat.

Tentunya politik isolasi merupakan faktor yang penting dalam upaya mengukur keberhasilan nilai-nilai dan sistem-sistem yang berlaku di zaman Edo. politik isolasi yang berarti rantai atau upaya untuk membelenggu atau merantai negara Jepang dari pengaruh asing merupakan salah satu kebijakan utama yang menyebabkan berhasilnya Jepang terlepas dari berbagai pengaruh luar pada waktu itu, dengan terbebasnya Jepang dari pengaruh luar tersebut, kebijakan-kebijakan yang berlaku selama zaman Edo dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dari berbagai lapisan masyarakat pada masa isolasi berlangsung, sehingga keluarga Tokugawa dapat mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari

³⁷ *Ibid.* hal.23

³⁸ Rikihie Inoguchi, Tadashi Nakajima, Roger Pineau, *op. cit.*, hal.124

200 tahun. Tentunya hal tersebut merupakan masa yang panjang dalam membentuk karakter dan budaya bangsa Jepang.

Kematangan budaya dan pola pikir yang terbentuk selama berlakunya politik isolasi di Jepang memiliki pengaruh terhadap terciptanya identitas masyarakat Jepang yang bersifat feodal dengan sistem hirarki yang kuat. Sehingga nilai-nilai kepatuhan, senioritas, kesetiaan dan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara dan kaisar masih terbawa sampai akhirnya Jepang memasuki era modern hingga pecahnya perang dunia.

Bila disimpulkan berikut adalah nilai-nilai yang berlaku selama zaman Meiji sampai berakhirnya Perang;

Tabel 4. Nilai-nilai dan praktek dari akhir Meiji sampai berakhirnya Peperangan

Kecurigaan besar terhadap orang asing
Kecurigaan besar terhadap gagasan kebebasan dan demokrasi yang nyata
Tekad untuk berhasil
Rasa kebanggaan nasional yang kuat dan terciptanya semangat kebangsaan yang tinggi
Kepatuhan dan ketaatan kepada otoritas pemimpin (sekali pun hanya sering di bawah paksaan)
Penghormatan untuk kaisar
Pengendalian sudut pandang masyarakat
Kesadaran pentingnya ekonomi
Kebangkitan kembali sistem hirarki yang pernah berlaku pada zaman isolasi Edo
Intensifikasi konsep kemurnian, terutama diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang
Mengidealisasikan kembali konsep Samurai Jepang yang berlaku pada zaman Edo
kecenderungan untuk memberikan batasan visi kepada semua kalangan

Sumber; A History of Japan From Stone Age To Superpower (2004: 138)

Tabel 7. urutan peristiwa yang terjadi dari zaman Edo sampai Perang Dunia II

Edo 1603 – 1867	Meiji 1867	Taisho 1915 - 1925	Showa 1930
1. Pemerintahan Feodal	1. Sikap anti Asing (<i>sonno Joi</i>)	1. Upaya menyamakan kedudukan dengan Barat	1. Mantapnya Pemerintahan militerisme Jepang
2. Kecurigaan terhadap pengaruh asing	2. Pembukaan Negeri	2. Perang Dunia I	2. Terbentuknya LBB
3. Pemerintahan yang otoriter	3. Pemerintahan demokrasi	3. Jepang terlibat Perang dengan Jerman	3. Jepang dipaksa menyerahkan Semenanjung Shandong
4. Politik isolasi atau penutupan negeri	4. Penghapusan sistem pelapisan sosial	4. Jepang menduduki Semenanjung Shandong	4. Jepang meninggalkan LBB
5. Pengendalian sudut pandang	5. Pengembalian kekuasaan ke tangan kaisar	5. 21 tuntutan Jepang terhadap Cina	5. Perang Jepang cina
6. Pengembangan nasionalisme melalui Shinto	6. Mengejar ketertinggalan dengan Negara-negara Barat	6. Prinsip memuliakan jalan Kaisar sampai ke Asia Timur Raya	6. Perang Dunia II
7. Pelapisan sosial	7. Pengembangan pendidikan		7. Pakta Tripartite Jepang, Jerman dan Itali
8. Pemantapan sistem hirarki	8. Pemeliharaan nilai-nilai tradisional		8. Perang Pasifik
9. Kegemilangan budaya	9. Pengiriman mahasiswa ke Negara-negara Eropa dan Amerika		9. Penjatuhan Bom Atom
	10. Prinsip negara kaya militer kuat.		10. Jepang kalah
	11. Ekspansi ke luar negeri		

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang berlaku pada masa diberlakukannya politik isolasi di Jepang telah berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Jepang sampai di era modern. Selanjutnya, dari data-data kualitatif yang terkumpul dan digunakan sebagai acuan untuk menganalisa pengaruh politik isolasi Jepang terhadap nasionalisme bangsa Jepang sampai pecahnya perang Dunia I dan II, dapat dijelaskan melalui tabel –tabel berikut ini.

Tabel 5. Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang dilihat dari nilai-nilai yang berlaku pada masa Isolasi berlangsung

Nilai-nilai yang Berlaku Selama Politik Isolasi (Sakoku) berlangsung
1. Pengembangan nasionalisme berdasarkan ajaran Shinto.
2. Pemberlakuan Etika prajurit bagi semua lapisan masyarakat
3. Pembagian kelas sosial sebagai upaya memantapkan pola hirarki
4. Pengendalian sudut pandang masyarakat
5. Pengendalian penuh terhadap pergerakan masyarakat khususnya dari pengaruh Asing melalui politik isolasi

Tabel 6

Nasionalisme Jepang pada Perang Dunia I dan II
1. Pemujaan terhadap kaisar sebagai alasan berperang
2. Sikap anti asing
3. Pemberlakuan Etika prajurit (<i>Bushido</i>) dalam menghadapi perang
4. Rasa kebangsaan yang kuat
5. Sistem hirarki yang kuat

IV. KESIMPULAN

Perjalanan sejarah politik luar negeri Jepang mengalami perkembangan yang pasang surut, di mulai dari dijalinnya hubungan dengan negara tetangganya Cina, sampai masuknya Portugis yang membawa kebudayaan Eropa dari persenjataan sampai agama Kristen, yang dianggap telah mengancam orientasi penyatuan negara Jepang yang sudah berusaha disatukan Jepang dari awal masa pembentukan negara feodal. Kecurigaan ini dipelopori oleh tokoh penguasa Jepang pada zaman Azuchi Momoyama yaitu Toyotomi Hideyoshi, yang di masa kepemimpinannya sudah mulai mencurigai adanya dominasi dari negara-negara Eropa.

Di era Tokugawa inilah kemudian kecurigaan terhadap pihak asing ini dijadikan peraturan nasional, yang isinya melarang siapapun penduduk Jepang untuk pergi ke luar negeri dan yang berada di luar

negeripun dilarang kembali ke Jepang. Dan khususnya Jepang menutup hubungannya dengan negara manapun kecuali Cina dan Belanda, yang menurut pandangan Jepang kedua negara tersebut tidak berupaya untuk menyebarkan ideologi-ideologi baru seperti agama Kristen yang coba disebarkan oleh bangsa Spanyol misalnya. Peraturan inilah yang dikenal dengan politik sakoku (isolasi).

Di masa politik sakoku (isolasi) ini berlangsung, Jepang berada dalam ketenangan dan kedamaian yang panjang. Peraturan-peraturan yang coba diberlakukan oleh penguasa Tokugawa pada saat itu telah berperan membentuk pola pikir, budaya, nilai-nilai dan ideologi bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Keberhasilan yang diperoleh penguasa Tokugawa tersebut dikarenakan keputusannya memberlakukan politik sakoku (isolasi), sehingga Jepang pada saat itu tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi asing manapun. masa isolasi ini telah memberikan dampak yang signifikan dilihat dari keberlangsungannya yang dapat bertahan selama 250 tahun lebih berada dibawah kepemimpinan keluarga Tokugawa, dan terciptanya kegemilangan budaya yang akhirnya membentuk identitas negara feodal Jepang yang kuat.

Masa isolasi yang panjang tersebut juga telah memberikan pengaruh terhadap perilaku politik Jepang di era modern. Nilai-nilai kepatuhan, dan rasa kesetiaan yang menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi yang lazim terjadi pada masa isolasi berlangsung juga terbawa sampai Jepang memasuki era modern. Khususnya ketika

Jepang terlibat dalam Perang Dunia I dan II, hal ini dapat dilihat bahwa berbagai alasan yang coba diungkapkan oleh para elit militer, tokoh, prajurit, hingga rakyatnya mengutarakan alasan-alasan tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai hirarki dan kejayaan kerajaan kaisar Jepang yang sudah tertanam semenjak masa isolasi berlangsung. Nilai-nilai tradisional yang pernah berlaku pada masa isolasi inilah yang telah memberikan keuntungan bagi upaya pencapaian kepentingan nasional Jepang pada masa berlangsungnya perang. Karena bagaimanapun nasionalisme terbentuk berdasarkan rasa persamaan ideologi, geografi, kerajaan yang sama, dan nilai-nilai yang juga diperkuat dengan adanya sebuah kebijakan politik yang dapat mendukung pelaksanaan politik tersebut. Akhirnya masa isolasi panjang yang dialami Jepang telah memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter nasionalisme Jepang di era modern khususnya di masa berlangsungnya Perang Dunia I dan II.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- [2] Benedict, Ruth, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982.
- [3] Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*; PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005.
- [4] Banner, Erica. *Nationalism In Japan Edited by Naoko Shimazu, "Japanese National Doctrines In International Perspective"*, Routledge, New York, 2006.
- [5] Gordon, Andrew. *A modern History of Japan: From Tokugawa Times to The Present*, Oxford University Press 2003.
- [6] Hall John Whitney, *The Cambridge History of Japan (Volume 4 Early Modern Japan)*, USA, Cambridge University Press, 2008.
- [7] Henshall, Kenneth G, *A history of Japan from Stone Age to Superpower*, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York. 2004.
- [8] Holsti, K,J. *International Politics: A Framework for Aanalysis*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1992.
- [9] Irsan, Abdul. *Budaya dan perilaku politik Jepang di Asia*, 2007.
- [10] Murayama, Motofusa. Kazokushugi and Shudanshugi Management Approaches: *Sources of Concept Variance in Japanese Business Setting*, Editted By Sang M.Lee and Gary Schwendiman, New York: Praeger Special Studies, Praeger, 1982.
- [11] N.Bellah, Robert. *Tokugawa Relegion (The Culture Roots of Modern Japan)*, Collier Macmillan Publishers, London, 1985.

- [12] Rikihie, Inoguchi, Roger Pineau, Kisah Para Pilot Kamikazze (Pasukan Udara Berani Mati Jepang Pada Perang Dunia I), Komunitas Bambu, Depok, 2008.
- [13] Ryuugakusei no Tameno Nihonshi, *Japanese History An Introductory Text*, Tokyo gaikugodaigaku, Tokyo University of Foreign Studies, 2004.
- [14] Saronto, Budi. *mekanisme kerja keiretsu berdasarkan hirarki loyalitas keakraban (onjossshugi) dan patrimoni sesuai nilai-nilai kebudayaan orang jepang* , Depok Universitas Indonesia, 1997.
- [15] Schlichtmann, Klaus. *Japan In The World; Shidehara Kijuro, Pacfism, and The Abolition of War*, The Rowman & Littlefield Publishers, INC, New York. 2009.
- [16] Setiawan S, Iwan, Konsensus Nemawashi dan Ringi (Budaya Manajemen Jepang Membangun Produktivitas Kerja), PT. Elex Media Computindo, Jakarta, 2004
- [17] Surajaya, Ketut I. *Pengantar Sejarah Jepang I*, Jakarta, 2001.
- [18] _____. *Pengantar Sejarah Jepang II*, Jakarta, 2001
- [19] Takeshi, Matsumae and Koyu, Sonoda, *The Cambridge History of Japan Volume I*, Cambridge University Press, New York, 2008